

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Indonesia

Nuri Anggraeni¹, Widya Astuti¹

¹ Program Studi Gizi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia

Email: nurianggraeni409@gmail.com

Received:30/06/2023; Revised:05/12/2023; Accepted:12/12/2023; Published:15/12/2023

ABSTRACT

Based on the WHO classification, the prevalence of stunting in Indonesia is still high, at 21.6%. Stunting is a severe nutritional problem, it can cause impaired brain development so that their intelligence and cognitive function will decrease. In the long term, stunting can cause a decline quality of human resources in Indonesia. Therefore, the government and society have to work together to overcome this problem. This article aimed to determine and analyze the implementation of local government policies and inhibiting factors in efforts to prevent and overcome stunting issues in Indonesia. This article used a literature review of articles published with sources from Google Scholar, PubMed, and Elsevier. The results of the review showed that government programs for overcoming stunting can be grouped into three: counseling, providing additional food and providing health facilities. However, in the implementation, several obstacles can hinder, including a lack of human resources, facilities, and funding sources, and low participation of knowledge and awareness from the community.

Keywords: *stunting, government, programs, policy*

ABSTRAK

Berdasarkan klasifikasi dari WHO, Indonesia masih tergolong menjadi negara dengan angka kejadian stunting yang tinggi karena persentasenya berada di atas 20%. Stunting adalah salah satu permasalahan gizi yang harus segera kita atasi karena stunting dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan perkembangan otak sehingga kecerdasan dan fungsi kognitif tubuhnya akan menurun. Sehingga pada jangka panjang, kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat menurun akibat stunting. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan beserta masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah stunting ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan faktor penghambat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan permasalahan stunting di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah studi tinjauan literatur (*literature review*) dengan memanfaatkan database elektronik *Google Scholar*, *PubMed* dan *Elsevier*. Dari beberapa database tersebut, diperoleh 6 artikel yang sesuai dengan kriteria dari artikel yang akan dibuat. Setelah melakukan analisis terhadap keenam artikel tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu penyuluhan, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pengadaan fasilitas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat atau mengganggu berjalannya program tersebut. Beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pencegahan stunting ini adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia, tidak memadainya sarana dan prasarana, kurangnya sumber dana, serta rendahnya partisipasi pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci: stunting, pemerintah, program, kebijakan

PENDAHULUAN

Merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia mencapai berada pada persentase 21,6%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, prevalensi stunting di Indonesia memang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Meskipun begitu, berdasarkan kriteria yang dimiliki WHO, stunting di Indonesia masih termasuk kategori tinggi karena persentasenya berada di atas 20% (Kemenkes RI 2022). Stunting merupakan kondisi dimana tubuh suatu individu balita gagal bertumbuh sehingga tinggi badannya lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tinggi balita di usia tersebut pada umumnya. Kekurangan zat gizi kronis pada anak yang terjadi di periode 1000 hari pertama kehidupannya atau pada balita usia 0 hingga 2 tahun merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan stunting ini (Fadilah et al. 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah dan Ismarwati (2023) menunjukkan bahwa terdapat penyebab langsung dan tidak langsung dari kejadian stunting pada balita ini. Penyebab langsung terjadinya stunting terdiri dari kurangnya asupan zat gizi dalam jangka panjang, adanya masalah kesehatan pada ibu hamil, saat bersalin, dan pada periode nifas, ibu dengan tubuh yang pendek, penyakit infeksi yang dialami balita, ketidakmampuan ibu untuk memberikan asi eksklusif pada bayi, serta ketidakmampuan pemberian MP-ASI pada anak. Adapun penyebab tidak langsungnya terdiri dari kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga mempengaruhi ketahanan pangan

keluarga, keadaan sosial yang mempengaruhi budaya, gaya hidup, serta pola asuh serta pola makan anak. Selain itu, kesehatan keluarga serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang kurang baik juga merupakan penyebab tidak langsung terjadinya stunting ini.

Permasalahan stunting di Indonesia harus segera diatasi karena stunting dapat memberikan dampak yang sangat serius baik terhadap individu maupun negara. Dari hasil penelitian Anwar, Winarti, and Sunardi (2022) diketahui bahwa seseorang yang stunting akan mengalami gangguan perkembangan otak sehingga kecerdasan dan kinerja kognitif tubuhnya akan menurun. Kurang optimalnya pertumbuhan otak ini akan menyebabkan kurangnya produktivitas dan kualitas pada saat anak tersebut dewasa. Sehingga, apabila tidak segera diatasi, Indonesia akan mengalami penurunan kualitas sumber daya manusia pada generasi-generasi berikutnya (Syahida and Daliman 2022).

Melihat dampak dari stunting yang sangat serius, upaya penanggulangan stunting harus dilakukan sedini mungkin. Salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini adalah pemerintah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alamsyah et al (2023), diketahui bahwa beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi stunting terdiri dari sosialisasi dan pemberian penyuluhan terkait penanganan stunting kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang diberikan kepada ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan

enrgi kronik, serta pada anak-anak yang berstatus stunting.

Studi mengenai keberhasilan implementasi program penanggulangan stunting menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan atau kendala yang terjadi selama penyelenggaraan program-program tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami selama proses implementasi upaya penurunan masalah gizi yaitu sulitnya koordinasi, kurangnya minat dari para pemangku kebijakan, terbatasnya sumber daya manusia, struktur kolaborasi yang tidak sama serta kurangnya ketersediaan anggaran (Saputri and Tumangger 2019). Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan program penanggulangan stunting. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi tinjauan literatur (*literature review*). Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian menggunakan metode ini yaitu menentukan rumusan masalah, mencari dan memilih karya tulis yang relevan, kemudian melakukan analisis lebih lanjut. Sumber literatur diperoleh dengan mencari artikel melalui *database* elektronik *Google Scholar*, *PubMed* dan *Elsevier*. Proses review berlangsung pada bulan Maret hingga Juni 2023 dan menghasilkan 33 artikel terpilih serta 6 artikel yang

sesuai dengan kriteria. Artikel yang dipilih sebagai referensi adalah artikel yang terbit dalam rentang 2019 sampai dengan 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stunting merupakan permasalahan status gizi yang dapat diketahui berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan yang dibandingkan dengan usia anak. Seorang anak dikatakan stunting apabila hasil pengukurannya kurang dari ambang batas normal atau nilai *Z-score* di bawah -2 SD. Apabila stunting tidak segera ditangani, stunting akan memperbesar risiko seseorang mengalami suatu penyakit, hambatan pada pertumbuhan mental dan motoriknya dan bahkan kematian (Rahmadhita 2020). Melihat dampak buruk dari stunting dan jumlah balita yang mengalami stunting di Indonesia, pemerintah berusaha untuk menurunkan prevalensi stunting salah satunya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program-program pencegahan stunting di masyarakat. Namun, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dan pengkajian kepustakaan pada analisis hambatan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan stunting di Indonesia, diperoleh 6 artikel yang relevan untuk dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil analisis dari keenam artikel disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Penelitian Terdahulu

Sitasi	Jenis Intervensi	Hambatan
(Indah et al. 2022)	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan

	posyandu secara rutin, pemberian PMT kepada anak dan balita stunting, Pendirian Rumah Desa Sehat	belum berlangsung secara rutin, pemberian PMT masih belum efektif, RDS belum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya
(Padang et al. 2022)	Penyuluhan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu menyusui serta pada remaja putri	Kurangnya respon dan partisipasi dari masyarakat dan keterbatasan dana yang diberikan
(Rahman M., and Dahlawi D. 2022)	Pembentukan rumah gizi gampong, pembentukan tim pendamping keluarga, sosialisasi terkait stunting	Kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, budaya kebiasaan makan, kurang menadainya kualitas sumber daya manusia
(Nurak et al. 2023)	Pembentukan tim percepatan penurunan stunting, dan pengadaan program gerakan masyarakat sadar pangan aman	Kurangnya Sumber daya manusia yang berlatar belakang gizi, kurangnya pemantauan pemerintah terhadap program yang dijalankan
(Yusmaniar ti et al. 2023).	Sosialisasi terkait stunting, program PMT (Pemberian	Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi

	Makanan Tambahan), dan penyelenggaraan kelas ibu hamil dan balita, pembentukan pos Gizi Nagari	dari masyarakat.
(Sahroji et al. 2022)	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, pemberian edukasi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi	Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap stunting

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan melaksanakan banyak sekali program di masyarakat agar dapat menurunkan persentase prevalensi stunting di Indonesia. Beberapa contoh kebijakan pemerintah daerah adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting (Rahmah, Dahlawi, and Rahman 2022) dan Surat Keputusan Nomor 188.4/140/Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua tahun 2022 (Indah and Yusran 2022). Selain itu, pemerintah daerah juga banyak mengadakan kegiatan yang mendukung kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sosialisasi dan penyuluhan, pemberian makanan

tambahan serta penyediaan fasilitas kesehatan.

Sosialisasi dan Penyuluhan:

Salah satu program yang sering digunakan dalam pencegahan stunting adalah sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat. Sasaran dari program ini terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, wanita usia subur, balita. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai stunting, penyebab, gejala, dampak dan pencegahannya dapat meningkat (Ahmad, Dadang, and Latipah 2022).

Pemberian Makanan Tambahan:

Pemberian makanan tambahan adalah salah satu program pemerintah yang dilakukan untuk menambah asupan gizi seseorang demi tercapainya status gizi yang lebih baik. Jenis makanan yang diberikan dapat berupa masakan keluarga yang berbasis pangan lokal atau dapat berbentuk makanan pabrikan yang sudah terjamin komposisi gizinya dan lebih praktis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan dapat berkontribusi meningkatkan asupan energi sebesar $54,60 \pm 15,42\%$ dan asupan protein sebesar $79,17 \pm 37,75\%$ dari total kebutuhan dalam sehari (Waroh 2019).

Penyediaan Fasilitas Kesehatan:

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting ini adalah dengan membangun fasilitas kesehatan di masyarakat. Fasilitas kesehatan dapat berupa puskesmas, posyandu, pembentukan rumah gizi gampong, pembentukan pos Gizi Nagari dan masih banyak lagi. Ketersediaan fasilitas kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap kejadian stunting. Hal ini karena salah

satu fungsi fasilitas kesehatan adalah memberikan imunisasi dan pengobatan saat anak sakit sehingga dapat mencegah anak terkena penyakit infeksi yang merupakan salah satu faktor penyebab dari stunting.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala yang dapat menghambat keberlangsungan program-program tersebut. Hambatan ini menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi kurang maksimal sehingga upaya pemerintah untuk menurunkan persentase prevalensi stunting di Indonesia akan menjadi lebih lambat atau bahkan tidak terlaksana. Berdasarkan Tabel 1, hambatan yang terjadi selama proses penyelenggaraan program kebijakan dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu hambatan yang terjadi karena kurangnya sumber daya yang memadai dan hambatan karena kurangnya pengetahuan, partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Sumber Daya: Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia pada program penanggulangan permasalahan stunting ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada beberapa jurnal yang telah dianalisis sebelumnya, diketahui salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan pengetahuan mereka terhadap gizi dan stunting itu sendiri. Sumber daya manusia yang berperan pada upaya penurunan angka stunting ini terdiri dari dokter, tenaga gizi, bidan, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, kader-kader posyandu, PKK, KB serta kader dari program pembangunan manusia (Yudiana 2022). Sumber daya lainnya seperti sumber daya alat (fasilitas) dan sumber keuangan juga dapat

mempengaruhi keberlangsungan program yang diadakan pemerintah. Keterbatasan dana dari pemerintah daerah untuk masalah ini dapat menghambat usaha pemerintah dalam menurunkan angka stunting (Padang et al. 2022).

Peran Masyarakat: Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting bagi kelancaran usaha penurunan prevalensi stunting ini. Pada Tabel 1, diketahui terdapat banyak program yang menjadi terhambat dan kurang maksimal karena partisipasi yang diberikan masyarakatnya masih rendah. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai stunting dan pengetahuan gizi yang masih tergolong rendah juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan angka stunting di masyarakat. Salah satu contoh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap stunting ini adalah makanan yang diberikan kepada anak yang mengalami stunting ini tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh anak tersebut. Tetapi makanan tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya yang tidak berstatus stunting (Alamsyah et al. 2023).

KESIMPULAN

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan dan mengadakan program-program yang berhubungan dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat. Program tersebut dapat berupa sosialisasi dan penyuluhan, pemberian makanan tambahan pada anak berstatus stunting serta mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di masyarakat. Namun

dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat berjalannya upaya tersebut. Hambatan yang dialami dapat berupa kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber dana dan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, pengetahuan, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah juga merupakan hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian dapat berjalan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. N. A., Dadang, D., & Latipah, S. (2022). Sosialisasi Stunting di Masyarakat Kota Tangerang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 704-708.
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). *Systematic Review* Faktor Risiko, Penyebab dan Dampak Stunting pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 88-94.
- Fadilah, A., Pangestu, M. N., Lumbanbatu, S., & Defiyanti, S. (2022). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasarkan Faktor Penyebab Stunting pada Balita Menggunakan Algoritma *K-Means*. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 6(2), 223-230.
- Indah, S., & Yusran, R. (2022). Upaya Pencegahan Stunting di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511-16516.
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan*

- Kedokteran Tata Laksana Stunting*, 1-52.
- Khoiriyah, H., & Ismarwati, I. (2023). Faktor Kejadian Stunting pada Balita: *Systematic Review. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(01), 28-40.
- Nurak, A., Andayani, L., & Sahrhani, S. (2023). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Upaya Penanggulangan Stunting. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3803-3809.
- Padang, F., Pakpahan, R., Kaloko, I. P., Berutu, R. L. K., & Berutu, S. A. (2022). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting (Studi kasus: Desa Sumbul Dusun Bantuan Kerbo Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Sumatera Utara). *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 3320-3325.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225-229.
- Rahmah, M., & Dahlawi, D. (2022). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3).
- Rahmah, M., Dahlawi, D., & Rahman, A. (2022). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(1).
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive. Jurnal of Political Issues*, 1(1), 1-9.
- Syahida, A. A., & Daliman. (2022). Literatur Review: Telaah Pendekatan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura terhadap Stunting. *Seminar Nasional Psikologi*, 1(1).
- Waroh, Y. K. (2019). Pemberian Makanan Tambahan sebagai Upaya Penanganan Stunting Pada Balita di Indonesia. *Embrio*, 11(1), 47-54.
- Yudiana, T. (2022). Strategi Penguatan SDM dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Good Governance*, 18(2), 175-194.
- Yusmaniarti, Y., Khair, U., Setiadi, B., Suroso, A., Windayanti, W., & Alamsyah, P. J. (2023). Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 191-198.